

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana penyampaian informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan serta menilai efektivitas manajemen melalui indikator laba (Dharmawati, 2025). Informasi laporan keuangan sering kali dibagikan kepada pihak internal maupun eksternal, dengan laba sebagai salah satu indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas dan pertanggungjawaban manajemen (Hendra et al., 2025). Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba menjadi perhatian utama dalam menilai kinerja manajemen. Fokus manajemen terhadap pencapaian laba ini mendorong kecenderungan untuk mengejar target tertentu, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi atau pengaturan laba, yang dikenal sebagai manajemen laba (Dharmawati, 2025).

Manajemen laba merupakan suatu cara yang digunakan manajemen untuk mengelola laporan keuangan suatu perusahaan dengan memilih metode akuntansi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen (Mardiantoa et al., 2021; Khellystina, 2021). Manajemen laba diartikan sebagai suatu proses yang sengaja dilakukan dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan untuk mencapai tingkat laba yang dilaporkan (Dwiadnyani et al., 2025; Mertha, 2025). Dalam bidang akuntansi, praktik manajemen laba diperbolehkan dan dianggap wajar apabila tidak berlebihan (Gusliana et al.,

2022). Manajemen laba tidak dianggap sebagai tindakan curang karena tetap mematuhi aturan atau prinsip standar yang berlaku, khususnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (N. Sari et al., 2023). Pengelolaan laba juga dianggap wajar ketika pelaku bisnis menerapkan konsep “menunda pengakuan laba” ke periode berikutnya, bukan konsep “manipulasi laba” (Parapat dan Mukhlisin, 2021). Jika praktik ini dilakukan secara ekstrem, hal ini akan mengurangi keandalan laporan keuangan, menjadikannya tidak relevan, dan merupakan penipuan (Parapat dan Mukhlisin, 2021).

Menurut Shubqi et al. (2024), terdapat empat jenis praktik manajemen laba yang umum dilakukan. Pertama, *taking a bath*, yaitu pengakuan biaya dan kerugian besar pada saat kondisi perusahaan buruk untuk menciptakan laba yang lebih tinggi di periode berikutnya. Kedua, *income increasing*, dilakukan saat profit tinggi guna menghindari perhatian berlebih dari pihak luar dengan menambah beban seperti biaya iklan atau riset. Ketiga, *income maximization*, bertujuan menunjukkan kinerja baik, biasanya dilakukan oleh perusahaan yang terkait kontrak hutang, sistem kompensasi berbasis laba, atau dalam proses IPO. Keempat, *income smoothing*, yaitu perataan laba agar laporan keuangan tampak stabil dan menarik bagi investor dengan cara mengurangi fluktuasi laba.

Salah satu model manajemen laba yang dibahas dalam penelitian ini adalah perataan laba (*income smoothing*). Menurut Dwiadnyani et al. (2025) dan Mertha (2025), strategi manajemen laba yang paling berkelanjutan dari waktu ke waktu adalah perataan laba. Perataan laba digunakan untuk mengurangi volatilitas laba yang dilaporkan guna mencapai target yang

diharapkan dan bertujuan untuk menciptakan kesan yang baik terhadap efisiensi manajemen perusahaan (Jayanti et al., 2018). Dengan pengertian ini, *Income smoothing* mencerminkan suatu usaha dari manajemen untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi manajemen dalam menerapkan praktik *Income smoothing* (Dharmawati, 2025).

Fenomena *income smoothing* menjadi perhatian dalam penelitian akuntansi, terutama pada perusahaan manufaktur yang rentan terhadap volatilitas biaya dan permintaan (Hendra et al., 2025). Merujuk pada hasil literatur peneliti, salah satu kasus yang layak untuk dikaji di Indonesia adalah *accrual-based income smoothing* pada PT Akasha Wira International Tbk (ADES) selama periode 2019–2021. Berdasarkan laporan keuangan yang di publikasi Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan ADES menunjukkan peningkatan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 38,48%, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penjualan yang relatif kecil. Kenaikan laba tersebut terutama berasal dari penyesuaian akrual dan pengakuan beban yang ditunda, bukan dari peningkatan aktivitas operasional nyata (Wulandari dan Suganda, 2021; Mardianto dan Khellystina, 2021)

Temuan ini sejalan dengan studi Satrya Wibowo dan Fuad (2018) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba berbasis akrual dapat menciptakan *growth illusion* pada perusahaan publik. Selain itu, faktor internal seperti profitabilitas dan struktur kepemilikan juga memengaruhi keputusan manajerial dalam melakukan manajemen laba (Mardianto dan Jaslyn, 2024;

Mardianto dan Khellystina, 2021). Kasus ADES menegaskan bahwa *income smoothing* masih terjadi di sektor manufaktur Indonesia dalam lima tahun terakhir, sehingga menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Fenomena ini menunjukkan indikasi bahwa perusahaan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang stabil di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Praktik *income smoothing* semacam ini umumnya dilakukan untuk menjaga persepsi positif investor dan pemegang saham agar tetap percaya terhadap kinerja perusahaan (Juniarty et al., 2025). Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan komite audit, auditor eksternal, serta dewan komisaris dalam mencegah manipulasi pelaporan keuangan (Abdurrahim, 2022; Mardianto dan Jaslyn, 2024). Temuan mengenai kasus ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dimuat dalam Mohammed et al (2024) dan Al (2024), yang menyatakan bahwa variabel seperti ukuran komite audit, keahlian keuangan, dan frekuensi rapat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya praktik *Income smoothing* di perusahaan manufaktur, termasuk ADES.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *income smoothing* adalah karakteristik komite audit (Fitroni dan Feliana, 2022; Saragih dan Laksito, 2021). Pembentukan komite audit pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate governance* (GCG), yang bertujuan menjaga integritas laporan keuangan dan memberikan keyakinan kepada pengguna informasi keuangan bahwa laporan bebas dari pelanggaran atau fraud (Gardi et al., 2023; Widiyaya dan Veronica,

2022). *Corporate governance* muncul sebagai respons terhadap pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga mekanisme pengawasan internal, seperti komite audit, menjadi krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas manajemen, dan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan (Harahap & Ritonga, 2025). Kombinasi penerapan GCG dan penguatan peran Komite Audit dapat meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan kualitas pelaporan secara keseluruhan (Gardi et al., 2023)

Komite audit memiliki peran penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Pasaribu & Soeratin, 2024). Efektivitas pengawasan komite audit tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada karakteristik anggotanya, yaitu *gender*, ukuran, frekuensi rapat, tingkat pendidikan, dan keahlian keuangan (Defina dan Kuswanto, 2025). Beberapa studi empiris menunjukkan pengaruh masing-masing karakteristik terhadap pengendalian praktik manajemen laba, meskipun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi (Cahyo Bagaskara dan Chariri, 2024).

Keberagaman *Gender*, khususnya kehadiran perempuan dalam komite audit dipercaya mendorong sikap etis dan konservatif sehingga berpotensi menekan praktik *Income smoothing* (Saragih et al., 2021; Laksito, 2021). Beberapa penelitian empiris Yuniargo et al (2021) dan Harindahyani (2021), menunjukan *Gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, Fitroni dan Feliana (2022) menemukan bahwa *Gender* tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi

bukti empiris, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kembali pengaruh *Gender* komite audit terhadap *Income smoothing* .

Ukuran komite audit yang lebih besar memperluas pengawasan dan menurunkan peluang manipulasi laba (Sihombing et al., 2017; Laksito, 2017). Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Pertiwi dan Laksito (2019) menemukan pengaruh positif ukuran komite terhadap pengendalian manajemen laba. Namun, hasil penelitian lebih baru juga menunjukkan hasil yang beragam: misalnya, studi oleh Amanda et al. (2024) menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN non-keuangan. Sedangkan, Sofia dan Dasmaran (2021) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit dan tingkat manajemen laba pada perusahaan industri di Indonesia. Dengan melihat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik *Income smoothing* .

Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Rosanita et al., 2024). Dalam POJK No.55/POJK- 04/2015 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Frekuensi rapat komite audit dianggap penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya *Income smoothing*

(Widijaya et al., 2022; Veronica, 2022). Nassir Zadeh et al. (2023) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang lebih sering berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sebaliknya hasil penelitian Widijaya dan Veronica (2022) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Melihat hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *Income smoothing*.

Selain itu tingkat pendidikan anggota komite audit dinilai mempengaruhi kemampuan analitis dan pemahaman laporan keuangan, sehingga dapat menekan praktik *Income Smooth* (Putri et al., 2023; Erinos, 2023). Pertiwi dan Laksito (2019) menekankan pentingnya pendidikan formal sebagai karakteristik kognitif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Namun, beberapa penelitian menemukan pengaruh pendidikan yang lemah atau tidak signifikan karena pendidikan formal tidak selalu mencerminkan pengalaman praktis atau literasi akuntansi. Inkonsistensi ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap praktik perataan laba.

Keahlian keuangan anggota komite audit memungkinkan mereka lebih jeli dalam mendeteksi indikasi praktik manipulasi seperti *Income smoothing* (Rosanita et al., 2024). Peraturan Bapepam mewajibkan minimal satu anggota memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keahlian keuangan dapat menekan praktik earnings management, namun efeknya tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh independensi, dukungan auditor eksternal, dan ukuran perusahaan (Huang dan Purwaningsih,

2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memastikan efek keahlian keuangan terhadap *income smoothing*, khususnya di perusahaan manufaktur.

Merujuk pada fenomena masalah dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan bukti empiris terkait pengaruh eksistensi komite audit perempuan terhadap praktik *income smoothing*. Beberapa penelitian menunjukkan keberadaan perempuan dalam komite audit mampu menekan praktik perataan laba (Fatimah, 2019; Yuniargo dan Harindahyani, 2021). sementara penelitian lain tidak menemukan pengaruh signifikan (Fitroni dan Feliana, 2022). Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh komite audit perempuan terhadap praktik *income smoothing*, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur Indonesia yang memiliki karakteristik laporan keuangan kompleks. Dengan meneliti keberadaan komite audit perempuan lebih singkatnya disebut *gender* sebagai salah satu variabel independen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih jelas mengenai peran keberagaman *gender* dalam pengawasan praktik *Income smoothing*.

Selain *gender*, penelitian mengenai ukuran komite audit terhadap *income smoothing* juga menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Beberapa studi menemukan ukuran komite yang lebih besar meningkatkan pengawasan dan menekan manajemen laba (Pertiwi dan Laksito, 2019), namun penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan atau bahkan hasil negatif pada beberapa sektor industri (Amanda et al., 2024; Sofia dan Dasmaran, 2021). Variabilitas hasil ini menandakan bahwa ukuran komite audit tidak selalu

konsisten dalam memengaruhi praktik *Income smoothing* , sehingga penelitian ini akan meneliti pengaruh ukuran komite audit dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih terfokus.

Beberapa studi menunjukkan frekuensi rapat yang lebih tinggi menekan praktik perataan laba (Muhammad dan Pribadi, 2020), tetapi penelitian lain tidak menemukan efek signifikan (Widijaya dan Veronica, 2022). Tingkat pendidikan formal anggota komite audit diyakini memengaruhi kemampuan analitis dan pengambilan keputusan, namun hasil penelitian sebelumnya lemah atau tidak konsisten (Pertiwi dan Laksito, 2019). Demikian pula, keahlian keuangan diyakini meningkatkan kemampuan deteksi praktik manipulasi laba, tetapi pengaruhnya tergantung pada faktor lain seperti independensi dan dukungan auditor eksternal (Huang dan Purwaningsih, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang menguji kelima karakteristik komite audit secara simultan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan terhadap *income smoothing* .

Dengan mempertimbangkan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, terbatasnya kajian empiris pada perusahaan manufaktur, dan fokus pada periode 2022–2024, penelitian ini bertujuan mengisi gap terkait pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik *income smoothing* . Kurangnya penelitian yang mengulas tentang tingkat pendidikan komite audit membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendidikan komite audit terhadap praktik perataan laba. Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak

sebagai komite audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (*financial expertise*).

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai jenis perusahaan yang diteliti. Penggunaan perusahaan manufaktur ini dikarenakan tingginya kemungkinan pelaksanaan manajemen laba pada perusahaan jenis ini. Hal ini disebabkan banyaknya aset perusahaan manufaktur yang berupa persediaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan pemilik banyak jenis persediaan, termasuk persediaan bahan baku, persediaan barang yang belum selesai, persediaan barang jadi dan persediaan lainnya (Amelia et al., 2024). Perusahaan manufaktur memiliki sektor yang sangat banyak di dalamnya, selain itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dengan bahan mentah yang siap disajikan dengan barang jadi oleh perusahaan manufaktur. Maka tak heran jika perusahaan manufaktur di Indonesia sangat menguntungkan pada tiap bidangnya.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat ketidakkonsistenan temuan terkait pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik *Income smoothing*. Beberapa kajian terhadap variabel karakteristik komite audit seperti *gender*, tingkat pendidikan, dan keahlian keuangan komite audit dalam konteks *income smoothing* masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran karakteristik komite audit dalam menekan praktik perataan laba, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Karakteristik komite audit ini merupakan isu yang penting dan menarik untuk

diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya juga lebih banyak membahas pengaruh karakteristik dewan direksi daripada karakteristik komite audit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh variabel dari karakteristik komite audit yang diproksikan dengan *gender* komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, tingkat pendidikan komite audit, dan keahlian keuangan komite audit sebagai variabel independen terhadap *income smoothing* sebagai variabel dependen karena masih adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena masalah dan inkonsistensi penelitian terdahulu maka perumusan masalah terhadap penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Apakah *Gender* Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *income smoothing* ?
- 2) Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *income smoothing* ?
- 3) Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *income smoothing* ?
- 4) Apakah Tingkat Pendidikan Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *income smoothing* ?
- 5) Apakah Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *income smoothing* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *gender* komite audit terhadap praktik *income smoothing* .
- 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik *income smoothing* .
- 3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap praktik *income smoothing* .
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan komite audit terhadap praktik *income smoothing* .
- 5) Untuk mengetahui pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap praktik *income smoothing* .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemikiran ilmiah bagi para pemakai hasil penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan, pemikiran dan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik *Income smoothing*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Studi tentang komite audit ini didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjadi landasan yang digunakan oleh perusahaan memahami tata kelola perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Pemegang saham sebagai pihak *principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku *oportunistik* dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Salah satu caranya adalah melakukan manajemen laba.

Muhammad et al. (2020) dan Pribadi (2020) menyatakan bahwa teori agensi berasumsi bahwa setiap individu mempunyai kepentingannya masing-masing. Perbedaan kepentingan ini berarti bahwa *agent* tidak selalu berusaha mencapai tujuan *principal*, karena *agent* seharusnya tidak hanya mencari kompensasi finansial, tetapi juga keuntungan pribadi lainnya seperti tambahan waktu luang, jam kerja fleksibel, dll. Pada saat yang sama, diasumsikan bahwa

principal hanya tertarik untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan. Ini disebut masalah keagenan.

Teori keagenan dapat menjelaskan mengapa terjadi manajemen laba. Teori keagenan menekankan pada hubungan antara manajer dan investor atau pemegang saham. Manajemen yang diberikan kepercayaan oleh investor untuk mengelola perusahaan mempunyai informasi yang cukup lengkap, berbeda dengan pemegang saham yang hanya mempunyai informasi terbatas. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan konflik antar pihak. Karena perbedaan kepentingan, kedua belah pihak berusaha mencari celah yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan teori keagenan, komite audit berperan sebagai pihak independen yang menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen. Karakteristik komite audit seperti ukuran komite audit, frekuensi rapat, *Gender*, tingkat pendidikan, dan keahlian keuangan merupakan dimensi penting yang menentukan efektivitas fungsi pengawasan mereka.

Komite audit dengan ukuran yang memadai memungkinkan distribusi tanggung jawab yang lebih baik, sehingga pengawasan terhadap laporan keuangan menjadi lebih efektif dalam mengurangi asimetri informasi dan potensi manipulasi laba. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan yang kuat dalam meninjau kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Keberagaman *Gender* di dalam komite audit diyakini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena adanya perspektif yang lebih luas dan kecenderungan anggota wanita untuk lebih berhati-hati terhadap resiko manipulasi pelaporan. Sementara itu, tingkat

pendidikan dan keahlian keuangan anggota komite audit memperkuat kemampuan mereka dalam memahami praktik akuntansi dan mendeteksi indikasi *earnings management* atau *income smoothing* yang dilakukan oleh manajemen.

Dengan demikian, karakteristik komite audit yang baik dapat menurunkan kemungkinan terjadinya konflik keagenan dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pada variabel *Income smoothing* dipandang sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. Manajemen berupaya mengatur laba agar terlihat stabil dengan tujuan untuk mempertahankan citra kinerja yang baik, mengurangi risiko pergantian, dan memperoleh kompensasi yang lebih tinggi. Praktik ini dapat merugikan pemegang saham karena mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menurunkan kualitas informasi laporan keuangan.

Komite audit yang kuat dan efektif berperan penting dalam mengurangi potensi *Income smoothing* dengan cara menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin baik karakteristik komite audit, maka semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan tindakan oportunistik dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, keterkaitan antara karakteristik komite audit dan praktik *Income smoothing* secara teoritis menunjukkan bahwa komite audit yang kompeten dan aktif mampu memitigasi konflik keagenan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

2.1.2 Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Sesuai dengan Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Baepam LK, 2012:1). Sedangkan Widiyaya et al. (2022) dan Veronica (2022), menyatakan bahwa tugas komite audit adalah menghilangkan kasus keagenan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal dengan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit dapat bekerjasama dengan dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memantau proses pelaporan keuangan manajemen, sehingga peran komite audit pasti akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Dalam Kep-643/BL/2012 untuk menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
5. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh dewan direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah dewan komisaris.
7. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Memeriksa dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik

Pengertian Komite Audit menurut Komite Nasional Kebiasaan *Governance* (2006) dalam pedoman umum GCG Indonesia yaitu:

1. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh orang yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
2. Komite audit juga merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Konsep GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme check and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya
3. Komite audit adalah pihak yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Komite Audit

Harinurdin et al. (2023) dan Safitri (2023) menyatakan komite audit diharapkan bisa mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG (*independency, transparency, accountability,*

responsibility dan *fairness*) pada korporasi yang bersangkutan. Prinsip independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh peraturan No.IX.I.5 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP29/PEM/2004 tanggal 24 september 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang diringkas sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, dan pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa nonaudit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan untuk memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
5. Tidak bekerja sebagai komite audit dalam perusahaan lain.

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri

dari tiga anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.

2.1.2.3 Peran Komite Audit

Menurut Tambunan et al. (2021), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Komite Audit menjalankan fungsi mengendalikan pelaksanaan tugas Audit Internal. Komite Audit melaksanakan fungsi pengendalian pelaksanaan fungsi Auditor sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Komite Audit

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit menurut Pratiwi (2023), dalam pedoman pembentukan komite audit yang efektif adalah:

1. Pelaporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan

audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. *Corporate governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Keberadaan komite audit diatur melalui surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 bagi perusahaan publik dan keputusan menteri BUMN Nomor KEP-103 MBU/2002 bagi BUMN (Alison, dalam Sukarno, 2015). Komite audit terdiri dari setidaknya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengadilan yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan pelatihan dewan komisaris/dewan pengawas.

Keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merupakan salah satu pilar utama penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan (Defina dan Kuswanto, 2025).

2.1.3 Karakteristik Komite Audit

Komite audit memegang peranan penting dalam penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar komite audit dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, diperlukan kualifikasi khusus yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara optimal. Keahlian atau karakteristik komite audit diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan kepercayaan diri anggota agar dapat bekerja secara maksimal dan terbaik. Karakteristik komite audit antara lain:

1. *Gender* Komite Audit

Literatur akuntansi perusahaan menjelaskan bahwa *gender* dalam manajemen dapat memengaruhi tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan (Fatimah, 2019). Menurut Fitroni et al. (2022) dan Feliana (2022), bahwa keragaman *gender* dapat menimbulkan tantangan seperti masalah komunikasi dan konflik antarindividu, namun juga memberikan manfaat berupa perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, inovasi dan kreativitas yang lebih beragam, serta efektivitas pemasaran kepada berbagai tipe pelanggan. Secara umum, wanita cenderung memiliki kesabaran yang mendukung kemampuan dalam merespons hubungan dan situasi, sedangkan pria lebih berorientasi pada hierarki dan status sehingga lebih kompetitif. Perbedaan karakteristik *gender* ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku karyawan dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah, termasuk potensi tindakan terkait manajemen laba.

2. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit ditentukan oleh jumlah anggotanya, dan jumlah tersebut berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan untuk menangani permasalahan perusahaan (Putra et

al., 2020; Serly, 2020). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II Pasal 4, komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan publik. Oleh karena itu, komite audit harus memiliki jumlah anggota yang memadai agar dapat menjalankan tanggung jawab

Peningkatan ukuran komite audit dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen. Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, komite audit yang lebih besar juga berpotensi memperbaiki kualitas pelaporan keuangan sehingga laporan menjadi lebih andal dan aman. Dengan demikian, ukuran komite audit yang lebih besar dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba.

3. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam POJK No.55/POJK- 04/2015 menyebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Semakin banyak jumlah rapat komite audit maka semakin efektif komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap

manajemen, sehingga komite audit tidak berupaya untuk mengoptimalkan kepentingannya sendiri dan dapat meminimalkan manajemen laba

4. Tingkat Pendidikan Komite Audit

Kompetensi komite audit sangat dipengaruhi oleh latar pendidikan dan keahlian akademik formal; anggota komite audit dengan kualifikasi pascasarjana cenderung lebih efektif dalam mengendalikan earnings management. Tingkat pendidikan merupakan karakteristik kognitif yang memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan, sementara pelatihan tambahan memperluas pengetahuan anggota sehingga mereka mampu menemukan solusi yang lebih tepat dalam memecahkan masalah. Pendidikan perguruan tinggi juga membuka peluang karir yang lebih menjanjikan dan diharapkan meningkatkan konservatisme komite audit, sehingga secara signifikan dapat mengurangi praktik manajemen laba (Muhammad dan Pribadi, 2020)

5. Keahlian Keuangan Komite Audit

Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai komite audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (*financial expertise*). Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian di bidang

finansial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material. Variabel ini diukur dengan cara mencari presentase dari jumlah anggota komite audit yang merupakan *financial expertise* terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan.

Dengan memiliki anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan perataan laba pada laporan keuangan yang selanjutnya diterbitkan.

2.1.3.1 Gender Komite Audit

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik ini dipicu oleh adanya asimetri informasi, di mana manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Salah satu bentuk manipulasi laba yang umum dilakukan adalah *Income smoothing*, yaitu upaya manajemen menyamarkan fluktuasi laba agar terlihat stabil dan menarik bagi investor.

Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan membutuhkan sistem pengawasan yang efektif. Keberadaan komite audit merupakan salah satu bentuk mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaporan keuangan. Efektivitas komite audit sangat

dipengaruhi oleh karakteristik anggotanya, termasuk unsur ***Gender***.

Keberagaman *Gender* dalam struktur pengawasan dinilai mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengawasan. Fatimah et al. (2019) menjelaskan bahwa *Gender* merupakan salah satu faktor penting dalam struktur manajemen yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap kerja, serta tingkat kepedulian terhadap nilai-nilai etika dalam organisasi. Perempuan diyakini memiliki tingkat kehati-hatian dan sensitivitas moral yang lebih tinggi, serta cenderung bersikap lebih konservatif dalam menghadapi risiko, sehingga dapat menurunkan kecenderungan untuk menerima kebijakan yang mengarah pada manipulasi laporan keuangan.

Lebih lanjut, Fitroni et al. (2022) dan Feliana (2022), menyatakan bahwa keragaman *Gender* dalam suatu tim memang dapat menimbulkan tantangan komunikasi dan konflik antarpersonal. Namun, keragaman tersebut juga memberikan sejumlah keuntungan, seperti pandangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta keberhasilan dalam menyikapi pasar yang lebih beragam. Perempuan cenderung menunjukkan empati dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi situasi kerja, sementara laki-laki lebih berorientasi pada struktur hierarki dan kompetisi status.

Perbedaan karakteristik ini berkontribusi pada dinamika tim dan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan apabila dikelola dengan baik.

Penelitian Saragih et al. (2021) dan Laksito (2021), menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, perempuan cenderung lebih teliti, etis, dan berhati-hati dalam menilai suatu permasalahan. Hal ini mendukung peran perempuan dalam komite audit, khususnya dalam hal pengawasan terhadap laporan keuangan yang rawan manipulasi. Wanita lebih peka terhadap pelanggaran etika dan lebih mampu mendeteksi indikasi adanya manajemen laba dibandingkan laki-laki. Demikian pula, Brilianti et al. (2024) menyebutkan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan, pendekatan komunikasi, dan penghindaran risiko antara laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam pengawasan keuangan.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam struktur komite audit dapat memperkuat independensi dan objektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan. Keberagaman *Gender* tidak hanya menciptakan dinamika organisasi yang inklusif, tetapi juga berkontribusi dalam menekan praktik *Income smoothing* yang dilakukan oleh manajemen. Oleh sebab itu, *Gender* anggota komite audit merupakan variabel

penting dalam menilai efektivitas pengawasan keuangan perusahaan.

2.1.3.2 Ukuran Komite Audit

Dalam perspektif teori agensi, pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajemen dapat diperkuat melalui komite audit, terutama ketika operasional perusahaan semakin kompleks. Salah satu indikator efektivitas komite audit adalah ukuran komite audit atau jumlah anggota yang terlibat. Semakin banyak anggota dalam komite audit, semakin besar kapasitas sumber daya untuk menjalankan pengawasan secara menyeluruh karena keberagaman keahlian dan pembagian tanggung jawab yang lebih baik. Studi empiris menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap earnings management dan juga berdampak pada efektivitas audit quality dan pengawasan internal (Saragih dan Laksito, 2021). Dengan demikian, komite yang lebih besar dipercaya mampu memberikan pengawasan yang lebih efisien dan mendalam dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit paling sedikit terdiri atas tiga orang anggota, yang berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal yang

independen terhadap perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, perusahaan diwajibkan untuk memiliki komite audit dengan jumlah anggota yang cukup untuk menjamin fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan objektif. Semakin besar ukuran komite audit, maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan kolektif komite dalam menilai laporan keuangan dan mendeteksi adanya praktik manipulasi seperti *Income smoothing*.

Menurut Ardyanti et al. (2023) dan Kurnia (2023), jumlah anggota komite audit yang memadai dapat meningkatkan kinerja pengawasan karena anggota memiliki ruang diskusi yang lebih luas, serta kemampuan untuk membagi tanggung jawab secara fungsional. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Subali et al. (2021), ditemukan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang besar cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dan menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah dalam melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya intensitas pengawasan dan keanekaragaman perspektif yang dimiliki oleh para anggota dalam mengidentifikasi risiko pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap aktivitas

manajemen. Komite audit dengan jumlah anggota yang cukup diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara lebih optimal dalam mencegah praktik *Income smoothing* dan menjaga kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

2.1.3.3 Jumlah Rapat Komite Audit

Salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja komite audit adalah intensitas pertemuan atau jumlah rapat yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Dalam kerangka teori agensi, frekuensi rapat komite audit mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan anggota komite dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, termasuk pelaporan keuangan. Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka semakin tinggi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan manajemen, sehingga risiko terjadinya praktik oportunistik seperti *Income smoothing* dapat ditekan (Saragih dan Laksito, 2021)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa rapat komite audit wajib diselenggarakan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota komite. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa pertemuan yang rutin dan terjadwal menjadi kewajiban formal

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan komite audit. Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki komite audit aktif dan sering mengadakan rapat cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Wulanda et al. (2019) dan Aziza (2019) menegaskan bahwa frekuensi rapat komite audit dapat dijadikan indikator keterlibatan komite dalam fungsi pengawasan internal. Rapat yang rutin dilaksanakan memberi ruang bagi komite audit untuk mengevaluasi kebijakan manajemen, menelaah laporan keuangan interim, dan berkoordinasi dengan auditor internal maupun eksternal. Penelitian Karina et al. (2020), juga menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan terhadap praktik manajemen laba. Semakin sering komite audit bertemu, semakin tinggi pula intensitas diskusi dan evaluasi terhadap transaksi-transaksi keuangan yang berpotensi dimanipulasi.

Syahputra et al. (2025) menyatakan bahwa efektivitas rapat komite audit terletak pada keteraturan, kedalaman pembahasan, dan keterlibatan aktif seluruh anggota. Rapat yang hanya bersifat formalitas tidak akan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas pengawasan. Namun, apabila dilakukan secara konsisten dengan agenda yang substantif, rapat komite audit dapat menjadi sarana efektif dalam mendeteksi praktik penyimpangan dan mendorong

transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian, jumlah rapat bukan hanya memenuhi aspek kuantitatif, tetapi juga mencerminkan komitmen pengawasan.

Faradea et al. (2022) dan Suwarno (2022) menambahkan bahwa komite audit yang aktif dalam mengadakan pertemuan secara berkala menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap risiko keuangan perusahaan. Frekuensi pertemuan yang tinggi memungkinkan komite audit untuk memberikan masukan yang tepat waktu dan relevan kepada manajemen, serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara lebih menyeluruh. Hal ini pada akhirnya dapat memperkecil peluang terjadinya *Income smoothing* oleh pihak manajemen.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan dan regulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat komite audit merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Intensitas pertemuan yang tinggi tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas informasi keuangan perusahaan dari tindakan manipulatif.

2.1.3.4 Tingkat Pendidikan Komite Audit

Dalam kerangka teori agensi, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen, seperti komite audit, sangat bergantung pada kapabilitas dan kualitas individu yang

menjalankan fungsi tersebut. Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas individu komite audit adalah tingkat pendidikan formal yang dimilikinya. Tingkat pendidikan mencerminkan kemampuan kognitif, kapasitas berpikir kritis, serta pemahaman konseptual terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan tata kelola perusahaan. Individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi lebih mungkin memiliki pemahaman mendalam terkait standar pelaporan keuangan, regulasi pasar modal, serta risiko yang melekat dalam aktivitas manajerial, sehingga lebih mampu mendeteksi adanya praktik manipulasi seperti *Income smoothing* (Bilal et al., 2023).

Pertiwi et al. (2019) menyatakan bahwa kompetensi anggota komite audit sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang mereka miliki. Pendidikan tinggi memberikan landasan pengetahuan dan kerangka berpikir sistematis yang dibutuhkan dalam mengkaji informasi keuangan secara kritis. Selain itu, pendidikan juga menciptakan peluang untuk mengikuti pelatihan profesional dan sertifikasi, yang semakin memperkuat kapasitas teknis serta wawasan mengenai praktik-praktik pengawasan dan audit yang mutakhir. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung lebih konservatif dan memiliki integritas yang lebih kuat dalam menilai kewajaran laporan keuangan.

Parapat et al. (2021) menambahkan bahwa latar belakang pendidikan anggota komite audit, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, atau ekonomi, sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja komite audit dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik kemampuan analitis yang dimiliki dalam memahami kompleksitas transaksi keuangan, mengidentifikasi anomali dalam penyajian laporan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan tingginya sensitivitas terhadap pelanggaran etika dan potensi manipulasi keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015, anggota komite audit wajib memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang keuangan dan audit. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan jenjang pendidikan minimal, peraturan ini menekankan pentingnya kualifikasi akademik atau profesional yang relevan sebagai dasar kompetensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, perusahaan dengan komite audit yang anggotanya memiliki pendidikan minimal strata satu atau lebih tinggi, serta relevan dengan bidang tugasnya, menunjukkan kualitas pengawasan yang lebih baik dan

berkontribusi dalam menurunkan risiko terjadinya *Income smoothing* (Putri et al., 2023; Erinos, 2023).

Dengan demikian, tingkat pendidikan anggota komite audit merupakan faktor penting yang memperkuat pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Pendidikan yang memadai tidak hanya meningkatkan keandalan evaluasi terhadap pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, rasional, dan etis. Komite audit yang terdiri dari individu-individu dengan tingkat pendidikan tinggi diyakini mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencegah praktik manipulasi keuangan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

2.1.3.5 Tingkat Keahlian Komite Audit

Dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik, keberadaan komite audit merupakan mekanisme penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan mencegah praktik manipulatif yang merugikan pemangku kepentingan. Salah satu karakteristik krusial yang memengaruhi efektivitas komite audit adalah keahlian keuangan atau akuntansi yang dimiliki oleh anggotanya. Teori agensi menyatakan bahwa keberadaan pengawas yang kompeten akan mempersempit kesenjangan informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik

perusahaan (*principal*), serta meminimalkan potensi terjadinya tindakan oportunistik seperti *Income smoothing*.

Komite audit yang memiliki anggota dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan cenderung lebih efektif dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan dan mendeteksi penyimpangan dalam proses pelaporan. Menurut Muid et al. (2018) dan Tembalang (2018), keahlian di bidang akuntansi memberikan bekal bagi anggota komite audit untuk memahami struktur laporan keuangan, teknik akuntansi, serta prinsip audit yang berlaku, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi anomali atau rekayasa laporan laba perusahaan.

Alfiyasahra et al. (2020) dan Challen (2020) juga menegaskan bahwa kehadiran anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan akan memperkuat mekanisme pengawasan dan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Keahlian ini memungkinkan anggota komite audit untuk memberikan pertimbangan profesional dan penilaian objektif terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen, termasuk dalam hal menilai apakah terdapat indikasi *Income smoothing*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 secara eksplisit mengatur bahwa komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Ketentuan ini memperjelas bahwa keahlian teknis merupakan komponen wajib dalam struktur komite audit agar pengawasan dapat dilakukan secara substansial, bukan sekadar formalitas. Keberadaan anggota dengan latar belakang keuangan akan mempermudah komite dalam melakukan komunikasi dengan auditor eksternal, memahami laporan audit, serta menelaah strategi keuangan perusahaan secara menyeluruh

Oleh karena itu, keahlian keuangan dalam komite audit tidak hanya berfungsi sebagai penunjang administratif, tetapi menjadi elemen strategis dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan kompetensi yang memadai, anggota komite audit dapat lebih kritis dalam menelaah estimasi manajerial, mendeteksi praktik manipulatif, dan merekomendasikan perbaikan yang sesuai. Keahlian ini sangat dibutuhkan dalam konteks *Income smoothing*, yang sering dilakukan dengan teknik-teknik akuntansi yang kompleks dan memerlukan pemahaman teknis untuk dapat diidentifikasi secara tepat.

2.1.4 *Income smoothing*

Income smoothing (perataan laba) merupakan salah satu pola dari manajemen laba, dimana perataan laba itu sendiri meliputi penggunaan

teknik-teknik tertentu yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba dalam suatu periode sesuai dengan laba yang diinginkan (Fatimah et al., 2019). Menurut Herry et al. 2019), perataan laba diklasifikasikan menjadi *operating manipulations* dan *accounting manipulations*. Manipulasi operasi berkaitan dengan usaha untuk merubah keputusan operasional yang mempengaruhi aliran dana dan pendapatan bersih untuk satu periode.

Kebijakan perataan laba merupakan salah satu kebijakan manajemen yang tidak diumumkan yang digunakan untuk mengendalikan kuantitas dan kualitas informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Osma et al., 2019). Sedangkan manipulasi akuntansi berkaitan dengan penggunaan fleksibilitas dalam metode akuntansi untuk merubah besarnya laba.

Income smoothing dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk pelaporan eksternal terutama kepada investor, karena investor cenderung lebih menyukai return yang relatif stabil.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang mengkaji karakteristik komite audit pada perusahaan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, hanya beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian saat ini yang dapat disertakan, antara lain:

1. Widiyaya et al. (2022) dan Veronica (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel ukuran dan jumlah rapat komite audit. Namun, terdapat perbedaan signifikan, yaitu pada fokus penelitian meneliti manajemen laba secara umum, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji *Income smoothing* sebagai bentuk spesifik manajemen laba. Selain itu, mereka tidak meneliti variabel *Gender*, tingkat pendidikan, dan keahlian keuangan anggota komite audit.

2. Fitroni et al. (2022) dan Feliana (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Keragaman *Gender* Pada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Gender* pada dewan komisaris dan *Gender* komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang pada variabel *Gender* komite audit. Namun, perbedaan terletak pada fokus yang lebih luas terhadap beberapa organ tata kelola perusahaan dan objek penelitian yang tidak terbatas pada perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian mereka tidak mencantumkan *Income smoothing* sebagai variabel dependen, serta tidak mempertimbangkan aspek pendidikan dan keahlian keuangan komite audit.
3. Yuniargo et al. (2021) dan Harindahyani (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Gender Financial Expertise* Komite Audit Terhadap

Praktik Manajemen Laba Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Gender* komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian saat ini dalam penggunaan variabel *Gender* dan keahlian komite audit. Perbedaannya terletak pada sektor yang diteliti (non-keuangan), serta fokus pada manajemen laba secara umum, bukan *Income smoothing*. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan variabel tingkat pendidikan dan ukuran komite audit.

4. Karina et al. (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Auditor Eksternal Terhadap Praktik Manajemen Laba Di Indonesia”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik komite audit dan auditor internal memiliki pengaruh yang tidak signifikan bagi praktik manajemen laba perusahaan. Di sisi lain, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas perusahaan mempengaruhi praktik manajemen laba di dalam perusahaan secara signifikan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada topik komite audit sebagai mekanisme tata kelola. Namun, penelitian ini tidak mengkaji *Income smoothing* sebagai variabel dependen, tidak menyertakan variabel *Gender*, pendidikan, dan jumlah rapat dalam indikator karakteristik komite audit, serta tidak secara eksplisit menilai keahlian keuangan anggota komite.
5. Nusantara et al. (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate governance* Terhadap Praktik Perataan Laba

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Sedangkan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian (perusahaan manufaktur), variabel dependen (*Income smoothing*), dan salah satu variabel independen (jumlah rapat komite audit). Namun, penelitian tersebut tidak mengikutsertakan variabel *Gender*, pendidikan, dan keahlian komite audit, serta menggunakan pendekatan statistik yang berbeda.

6. Putri et al. (2023) dan Erinoss (2023) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Keahlian Akuntansi Komite Audit Dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian akuntansi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel keahlian dan *Gender* sebagai dimensi tata kelola. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada peran dewan komisaris dan tidak meneliti *Income smoothing*. Selain itu, aspek pendidikan komite audit tidak dikaji, serta teknik analisis yang digunakan berbeda.

7. Dwiyanti et al. (2018) dan Astriena (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba”. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Karakteristik komite audit yang diukur dengan ukuran komite audit, personal komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dalam penggunaan variabel ukuran, jumlah rapat, dan keahlian komite audit. Namun, perbedaannya terletak pada tidak digunakannya variabel *Gender* dan tingkat pendidikan sebagai dimensi karakteristik, serta fokus penelitian mereka masih pada manajemen laba secara umum, bukan secara khusus pada praktik *Income smoothing*. Selain itu, tidak ada penggunaan indeks tertentu seperti indeks Eckel untuk mengukur tingkat *smoothing* laba, sebagaimana diterapkan dalam penelitian ini.
8. Sihombing et al. (2017) dan Laksito (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba”. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan masa jabatan ketua komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan keahlian komite audit dan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian sekarang terletak pada variabel ukuran dan jumlah rapat komite audit. Namun, perbedaannya adalah tidak adanya kajian mengenai *Gender*, pendidikan, dan keahlian keuangan anggota komite audit, serta fokus yang masih berada pada manajemen laba, bukan *Income smoothing*.

9. Marshaet al. (2017) dan Ghozali (2017) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)". Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan audit eksternal, jumlah rapat dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek perusahaan manufaktur serta variabel ukuran dan jumlah rapat komite audit. Namun, penelitian ini tidak mengkaji *Income smoothing* secara spesifik dan tidak melibatkan variabel *Gender*, pendidikan, maupun keahlian keuangan anggota komite audit.
10. Widasari et al. (2017) dan Isgiyarta (2017) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Keahlian Komite Audit dan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba dengan Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015)". Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, keahlian komite audit yang dimoderasi audit eksternal berpengaruh positif pada manajemen laba, dan jumlah rapat komite audit yang dimoderasi audit eksternal berpengaruh positif pada manajemen laba. Perbedaan penelitian terdapat pada tahun penelitian. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel keahlian dan jumlah rapat. Namun, penelitian ini tidak menyertakan variabel *Gender*, pendidikan, serta tidak memfokuskan diri pada praktik *Income smoothing*.

11. Praptitorini et al. (2017) dan Januarti (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Umum Syariah Periode 2010-2012”. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan audit independent memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba pada perbankan umum syariah di Indonesia. Sedangkan dewan pengawas syariah (DPS) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan umum syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terdapat pada tahun penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki persamaan dalam variabel ukuran komite audit. Namun, perbedaan mencolok terletak pada sektor penelitian, yaitu perbankan syariah, serta tidak digunakannya variabel *Gender*, pendidikan, dan keahlian keuangan, dan tidak adanya fokus khusus pada praktik *Income smoothing*.

Kebaruan Penelitian (Novelty) ini memiliki kebaruan yang terletak pada *focus*, periode penelitian, serta cakupan variabel yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar hanya meneliti praktik manajemen laba secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji *Income smoothing* atau perataan laba sebagai bentuk spesifik dari praktik manajemen laba. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya perusahaan dalam menstabilkan laba yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini menggunakan *indeks Eckel* untuk mengukur tingkat perataan laba, yang belum banyak digunakan pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representative dalam konteks perilaku keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia.

Kebaruan berikutnya terletak pada periode penelitian, yaitu 2022-2024, yang mempresentasikan kondisi terkini setelah masa *pandemic* COVID-19. Periode ini penting karena banyak perusahaan melakukan penyesuaian strategi pelaporan keuangan akibat tekanan ekonomi dan perubahan struktur operasional. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan memberikan gambaran empiris terbaru mengenai bagaimana karakteristik komite audit berperan dalam mengendalikan praktik *Income smoothing* pada masa pascapademi.

Selain itu, penelitian ini memperluas dimensi karakteristik komite audit yang dikaji. Jika penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti ukuran dan jumlah rapat komite audit, penelitian ini menambahkan tiga dimensi baru, yaitu *Gender*, tingkat pendidikan, dan keahlian keuangan

anggota komite audit sebagai variabel independen. Penambahan ini memberikan nilai tambah teoritis karena mampu menggambarkan pengaruh komposisi dan kompetensi anggota komite audit terhadap integritas pelaporan keuangan lebih komprehensif.



UNMAS DENPASAR